



Analisis efektivitas dan kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung

Vinda Nurrezivanka Rudiana¹, Achmad Fadjar²

^{1,2}Universitas Widyatama

¹vinda.rudiana@widyatama.ac.id, ²achmad.fadjar@widyatama.ac.id

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 10 Januari 2023

Disetujui 18 Februari 2023

Diterbitkan 25 Maret 2023

Kata kunci:

Efektivitas; Kontribusi pajak bumi dan bangunan; Pendapatan asli daerah; Pembangunan nasional; Kesejahteraan rakyat

Keywords :

Effectiveness; Land and building tax contributions; Locally-generated revenue; National development; People's welfare

ABSTRAK

Keberhasilan pembangunan nasional suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di Indonesia, pajak memegang peranan penting karena pajak merupakan sumber utama pendanaan pemerintah dan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas dan kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung. Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian deskriptif dan verifikasi. Populasi penelitian didasarkan pada data pajak bumi dan bangunan Bandung tahun 2016–2020 dan data pendapatan daerah. Penelitian ini menggunakan sampling non-probability jenuh untuk memilih kelompok (sensus). Penelitian ini mengambil enam puluh sampel. Pengolahan menggunakan SPSS 23. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandung tahun 2016–2020 rata-rata efikasinya 92,59%. Tingkat kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung tahun 2016-2020 masih dalam kriteria sedang yaitu 26,38%.

ABSTRACT

The success of a country's national development is largely determined by its ability to improve people's welfare. In Indonesia, taxes play an important role because they are the main source of government and development funding. This study aims to determine the effect of the effectiveness and contribution of land and building taxes on the local revenue of the city of Bandung. This study applies a descriptive and verification research approach. The research population is based on Bandung land and building tax data for 2016–2020 and regional income data. This study uses saturated non-probability sampling to select groups (census). This study took sixty samples. Processing using SPSS 23. The results of this study found that the 2016–2020 Bandung City Land and Building Tax averaged 92.59% efficacy. The level of contribution of land and building tax to the local revenue of the City of Bandung in 2016–2020 is still within the moderate criteria, namely 26.38%.



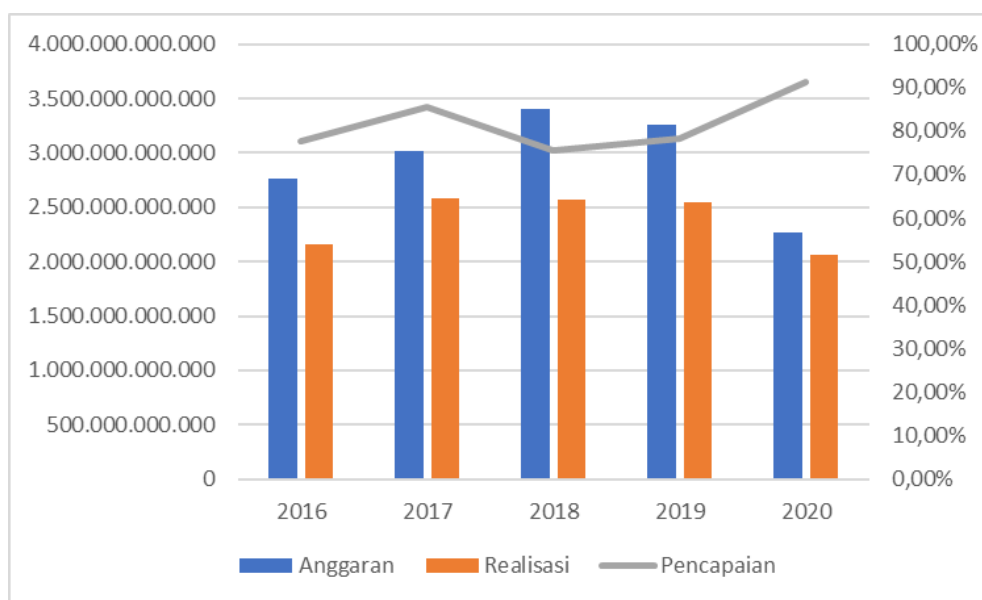
©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan nasional suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Khususnya Indonesia, daerah memiliki tanggung jawab dan hak untuk sebagai sarana pembangunan ekonomi otonom, mendirikan dan mengendalikan pemerintahannya sendiri. Kemudian, sumber daya ini didistribusikan di antara area, baik melalui pemekaran yang didasarkan pada pajak dan dana perimbangan atau cara lainnya (Wibisono & Mulyani, 2019). Di Indonesia, pajak memegang peranan penting karena pajak merupakan sumber utama pendanaan pemerintah dan pembangunan. Akibatnya, semua penduduk harus berkontribusi dan membayar pajak untuk mendorong pertumbuhan nasional (Andrianto & Fadjar, 2017). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah pembayaran wajib kepada daerah yang dilakukan oleh orang-orang atau badan-badan di bawah kekuasaan hukum yang memaksa yang digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah bagi kepentingan penduduk (Republik Indonesia, 2009). Pajak daerah yang dikenal dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan daerah. “Pajak bumi dan bangunan (PBB)” merupakan adalah pungutan objektif yang keadaan objeknya, seperti tanah dan/atau bangunan, menetapkan besarnya pajak yang ditanggung (Sari, 2013).

Pajak Bumi dan Bangunan yang tergantung pada tiap-tiap daerah memiliki potensi yang sangat besar tentang upaya mendongkrak pendapatan daerah. Demikian, pemerintah harus mampu mengelola Pajak Bumi dan Bangunan secara lancar (Fujianti & Sachintania, 2021). Maka untuk memaksimalkan otonomi daerah, pemerintah daerah harus meningkatkan ketergantungan mereka dalam PAD (Fauziah, 2021). PAD merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Worumi, 2018). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa pengertian Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah aturan dan peraturan daerah serta ketentuan daerah diikuti saat mengumpulkan pendapatan daerah (Republik Indonesia, 2004). Pajak Daerah ini harus ditangani untuk memaksimalkan pemanfaatannya guna meningkatkan kontribusi yang akan diberikan kepada Pendapatan Asli Daerah (Fujianti & Sachintania, 2021).

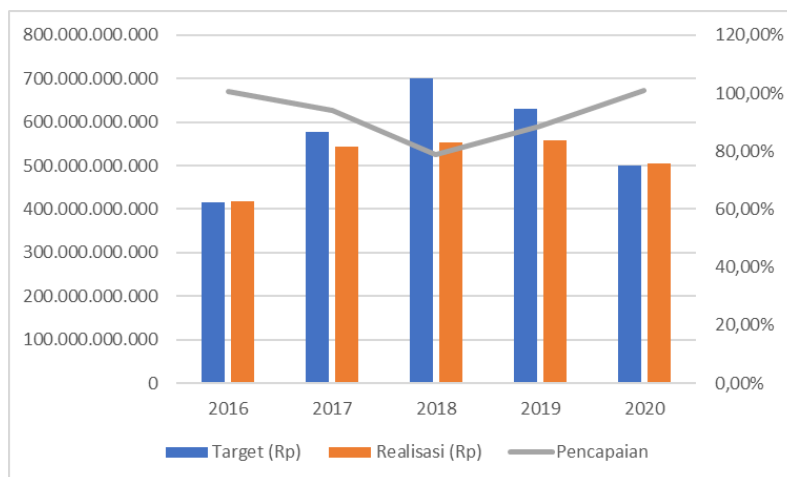
Kota Bandung, salah satu pelaksana daerah otonom, menawarkan sejumlah potensi daerah yang mungkin perlu dipertanyakan. Hal ini mencerminkan keadaan Bandung yang merupakan kota metropolitan metropolitan, tujuan komersial dan wisata populer yang diminati masyarakat luas baik domestik maupun internasional (Dinda, 2021). Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdapat masalah dalam menentukan target PAD setiap tahunnya (Muhamad, 2020). Kota Bandung mengalami kerugian akibat Covid-19 dari sisi pendapatan asli daerah PAD. Menurut Kepala Bidang Pembangunan BPPD Kota Bandung, PAD sudah turun sejak Maret 2020 (Bani Hakiki, 2021). Memang, selama lima tahun anggaran sebelumnya, ada beberapa kejadian di mana tujuan nominal PAD Kota Bandung tidak tercapai. Sulit bagi pembuat kebijakan untuk mempersiapkan sumber pembiayaan secara memadai sebagai akibat dari ketegangan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan, yang mengakibatkan penerimaan PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan masih kecil (Muhamad, 2020). Tabel rekapitulasi target menunjukkan bahwa total pendapatan yang mungkin untuk Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandung berfluktuasi beberapa kali antara tahun 2016 dan 2020, dan realisasi pajak ini juga sangat bervariasi. Berikut adalah laporan realisasi anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2016-2020:



Gambar 1 Grafik Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2016-2020

Sumber: Hasil output software excel 2019

Pendapatan awal area Bandung 2016–2020 ditunjukkan pada Gambar 1. Ini jauh dari target harga. Tingkat keberhasilan terbaik dan terburuk untuk upaya ini adalah 91,12% pada tahun 2020 dan 75,70% pada tahun 2018. Pajak daerah adalah pembayaran wajib yang dilakukan tanpa berpikir untuk mendukung kegiatan praktis daerah dan dapat dinilai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan (Johan et al., 2022). Berikut rangkuman realisasi anggaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016-2020:



Gambar 2 Grafik Laporan Realisasi Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandung Tahun 2016-2020

Sumber: Hasil output software excel 2019

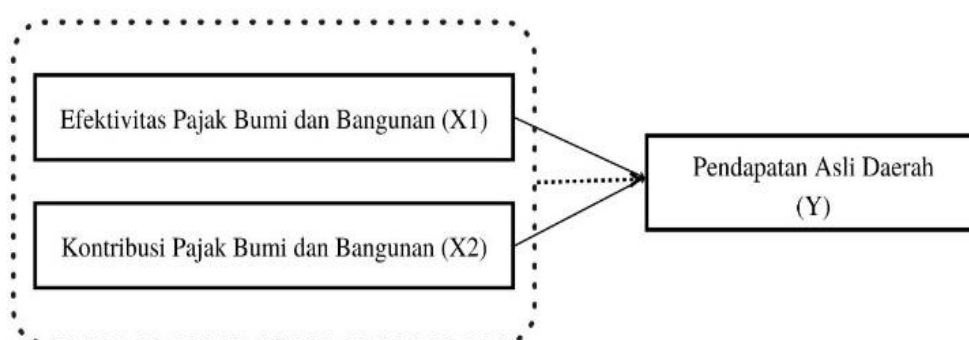
Menurut gambar 2 di atas, mulai tahun 2016-2019 grafik realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandung menaik. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Data tersebut terlihat fluktuatif, yang juga terlihat dari persentase keberhasilan. Persentase keuntungan pada tahun 2020 adalah 101,03%, sedangkan persentase penurunan adalah 78,90%. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Selain itu, terlihat dari persentase pelaporan bahwa data tampak berfluktuatif. Persentase peningkatan pada tahun 2020 sebesar 101,03%, dan yang mengalami penurunan di tahun 78,90%. Sektor PBB di Kota Bandung mendapati penyusutan Pajak Asli Daerah (PAD) paling besar selama dua tahun terakhir. Penghasilannya memuncak menjadi Rp 558 miliar pada akhir 2019 dan sejak itu turun menjadi Rp 505 miliar karena pandemi. Meski terjadi peningkatan hingga Rp579 miliar dari Juli 2021 hingga Juli 2022, jumlah tersebut dinilai jauh di bawah target Rp700 miliar (Bani Hakiki, 2021). Berdasarkan fenomena tersebut di atas, memungut pajak bumi dan bangunan sudah menjadi penentu pendapatan asli daerah Kota Bandung. Pajak bumi dan bangunan berpengaruh besar meskipun nilainya rendah. Karena uang mengalir ke daerah berkembang (Prathiwi et al., 2015). BPPD Kota Bandung dapat menggunakan studi ini untuk meningkatkan pendapatan, khususnya dari iuran tanah dan bangunan, untuk memaksimalkan sumber dayanya (Aghniya & Apriliawati, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh (Wibisono & Mulyani, 2019) yang menunjukkan efektivitas pajak bumi dan bangunan daerah pada pendapatan asli daerah termasuk dalam kategori efektif. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh (Damaiyanti & Setiawan, 2014) menyatakan bahwa yang membuktikan bahwa kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah rata-rata dibawah 50%. Penelitian yang dilakukan oleh (Damaiyanti & Setiawan, 2014) yang mengklaim bahwa ada pengaruh positif efektivitas pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Wibisono & Mulyani, 2019) memverifikasi bahwa pajak bumi dan bangunan memiliki dampak yang menguntungkan terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas dan kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang mana menurut (Sugiyono, 2016) bahwa metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistic, dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif dan verifikatif. Penelitian ini mencakup pajak bumi dan bangunan Kota Bandung 2016–2020 serta tujuan dan realitas pendapatan daerah. Penelitian ini menggunakan nonprobability sampling jenuh (sensus). Jadi, penelitian ini mengambil sampel enam puluh orang selama lima tahun, dua belas per tahun. Penelitian ini menggunakan laporan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Bandung tahun 2016–2020 sebagai data tambahan. Data sekunder merupakan informasi yang diberikan dalam bentuk publikasi oleh pihak lain (Nuryaman, & Christina, 2015). Teknik analisis menggunakan *time series*, yaitu data yang dikumpulkan secara periodik pada suatu hal dengan tujuan untuk mendokumentasikan perkembangan objek tersebut. Pengolahan data untuk penelitian ini dilakukan dengan SPSS 23.

Kerangka Pemikiran



Gambar 3 Kerangka Pemikiran

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis Deskriptif Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tabel 1 Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria Efektivitas
2016	415.000.000.000	417.139.352.208	100,51	Sangat Efektif
2017	578.500.000.000	543.210.584.172	93,90	Efektif
2018	700.500.000.000	552.686.400.078	78,90	Kurang Efektif
2019	630.000.000.000	558.242.627.008	88,61	Cukup Efektif
2020	500.000.000.000	505.193.534.229	101,04	Sangat Efektif
Rata-rata	564.800.000.000	515.249.499.539	92,59	
Max	700.500.000.000	558.242.627.008	101,04	-
Min	415.000.000.000	417.139.352.208	78,90	

Sumber: Data diolah, 2022

Efektivitas pajak bumi dan bangunan pada pendapatan asli daerah dari tahun 2016 hingga 2020 ditunjukkan pada Gambar 3. Efektivitas pajak bumi dan bangunan bervariasi dari 101,04% pada tahun 2020 menjadi 78,90% pada tahun 2018, dengan kriteria yang lebih lemah. Sehingga rata-rata efektivitas dari tahun 2016 hingga tahun 2020 sebesar 92,59%.

Analisis Deskriptif Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tabel 2 Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan

Tahun	Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria Kontribusi
2016	417.139.352.208	1.709.807.582.556	24,39	Sedang
2017	543.210.584.172	2.175.084.126.326	24,98	Sedang
2018	552.686.400.078	2.160.150.227.316	25,59	Sedang
2019	558.242.627.008	2.154.637.871.057	25,91	Sedang
2020	505.193.534.229	1.629.188.481.446	31,01	Cukup Baik
Rata-rata	515.294.499.539	1.965.773.667.740	26,38	
Max	558.242.627.008	2.175.084.126.326	31,01	-
Min	417.139.352.208	1.629.188.481.446	24,39	

Sumber: Data diolah, 2022

Persentase kontribusi pajak bumi dan bangunan meningkat tajam dari tahun 2016 hingga 2020. Rata-rata pajak bumi dan bangunan adalah 26,38%. Pada tahun 2020, pajak bumi dan bangunan sebesar 31,01%, sedangkan kontribusi terendah pada tahun 2016 sebesar 24,39%. Maka hasil perhitungan kontribusi selama tahun 2016 hingga tahun 2020 kontribusi pajak bumi dan bangunan di Bandung masih termasuk kedalam kriteria sedang.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 3 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3070774556	488665480.2		6.284	.000
Efektivitas	.336	.106	.384	3.163	.003
Kontribusi	-.375	.471	-.097	-.796	.429

a. Dependent Variable : Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Hasil *output* SPSS 23

Persamaan berikut dihasilkan berdasarkan tabel 3 di atas:

$$Y = 3070774555,814 + 0,336 X_1 + (-0,375 X_2) + \varepsilon \quad (1)$$

Berdasarkan persamaan diatas disimpulkan bahwa nilai konstanta sebesar 3070774555,814 menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah akan sama dengan jumlah tersebut jika keefektifan variabel dan kontribusi pajak bumi dan bangunan sama-sama nol, maka pendapatan asli daerah akan bernilai sebesar 3070774555,814. Estimasi regresi untuk efektivitas pajak bumi dan bangunan sebesar 0,336 (positif), artinya peningkatan sebesar satu satuan akan meningkatkan pendapatan daerah sebesar 0,336 satuan tanpa dipengaruhi oleh faktor lain. Estimasi regresi kontribusi pajak bumi dan bangunan sebesar -0,375 (negatif), artinya setiap kenaikan bagiannya mengurangi pendapatan daerah sebesar -0,375 satuan tanpa dipengaruhi oleh faktor lain.

Analisis Koefisien Determinasi

Tabel 4 Hasil Analisis Koefisien Determinasi Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.402 ^a	.162	.132	2374123231

a. Predictors : (Constant), Kontribusi, Efektivitas

Sumber: Hasil *output* SPSS 23

Nilai *R Squared* sebesar 0,162, juga dikenal sebagai koefisien determinasi, ditampilkan pada tabel 4 di atas telah tercapai. Hal ini menunjukkan efektivitas pajak bumi dan bangunan yang mencapai 16,2% dari pendapatan asli daerah bervariasi. Sisanya sebesar 83,8% varian disebabkan oleh variabel tambahan yang tidak diperhitungkan dalam analisis ini.

Pengujian Hipotesis Uji Parsial (Uji T)

**Tabel 5 Uji T
 Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3070774556	488665480.2		6.284	.000
	Efektivitas	.336	.106	.384	3.163	.003
	Kontribusi	-.375	.471	-.097	-.796	.429

a. Dependent Variable : Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Hasil *output* SPSS 23

Efektivitas pajak bumi dan bangunan berpengaruh pada pendapatan daerah, yang bervariasi pada tingkat yang lebih rendah (diterima H_0). Sedangkan kontribusi pajak bumi dan bangunan tidak sepenuhnya mempengaruhi pendapatan asli daerah (H_0 ditolak).

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 6 Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6.192E+19	2	3.096E+19	5.493	.007 ^b
	Residual	3.213E+20	57	5.636E+18		
	Total	3.832E+20	59			

a. Dependent Variable : Pendapatan Asli Daerah

b. Predictors : (Constant), Kontribusi, Efektivitas

Sumber: Hasil *output* SPSS 23

Hasil uji F disajikan pada Tabel 8, dan nilai signifikansi yang dihitung adalah 0,007. Bahwa angkanya kurang dari 0,05 (0,007 < 0,05) ditunjukkan dengan simbol ini. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa efisiensi dan partisipasi pajak kota atas properti dan bangunan berpengaruh terhadap jumlah uang yang terkumpul. Adapun hipotesis simultannya adalah H_a yaitu Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pembahasan

Analisis Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas pajak bumi dan bangunan mendongkrak pendapatan daerah. Nilai relevansinya adalah 0,003, yang kurang dari 0,05 (0,003 < 0,05), sehingga biaya tanah dan bangunan akan berdampak pada pendapatan daerah Bandung antara tahun 2016 dan 2020. Keberhasilan mengukur tujuan perusahaan. Sebuah organisasi berjalan dengan baik jika memenuhi tujuannya (Mardiasmo, 2017). Memenuhi target belanja negara Dewan Kota Bandung untuk pajak bumi dan bangunan serupa dengan efisiensi pajak yang dinyatakan dalam penelitian ini (Dinda, 2021). Penelitian ini menunjukkan bahwa antara tahun 2016 dan 2020, pendapatan pajak bumi dan bangunan Kota Bandung dapat sangat mempengaruhi pendapatan asli daerah. Jika biaya tanah dan bangunan lebih efisien, pendapatan awal daerah akan meningkat. Kemanjuran tahun 2018 adalah 78,90% karena faktor keefektifan yang lebih sedikit. Kepatuhan orang yang tidak membayar pajak menurunkan pendapatan bersih dari pajak bumi dan bangunan, dan jika tidak membayar akan dikenakan

denda 2% per bulan. Warga tidak memperlmasalahakan sanksi tersebut karena masih belum pasti yang berdampak pada sumber pendapatan daerah. Pengaruh pajak bumi dan bangunan terhadap pengumpulan pajak awal kota dapat diukur. Menurut (Putra et al., 2017), efikasi mengukur keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Biaya tanah dan bangunan Bandung rata-rata memiliki efikasi sebesar 92,59%, sehingga pendapatan daerah yang lebih besar menjamin efektifitasnya. Pemerintah Bandung memaksimalkan pendapatan pajak properti dan bangunan dan menegakkan kepatuhan pelanggan meskipun ada perubahan tahunan. Salah satu caranya adalah mengirimkan nota kecamatan atas keterlambatan pajak dan menyampaikannya di media (Dinda, 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fidiyaningtyas, 2020) dan (Wibisono & Mulyani, 2019) yang menunjukkan efektifitas pajak bumi dan bangunan daerah pada pendapatan asli daerah termasuk dalam kategori efektif.

Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Menurut penelitian ini, kontribusi pajak bumi dan bangunan tidak mempengaruhi pendapatan kota, menurut penelitian. Pajak Bumi dan Bangunan tidak berpengaruh besar terhadap pendapatan Kota Bandung tahun 2016–2020 karena nilai relevansinya sebesar 0,429. Pembayaran penghargaan. Bagian tersebut memutuskan seberapa besar pajak daerah meningkatkan pendapatan daerah. Keterlibatan melibatkan membandingkan pendapatan pajak daerah—khususnya pajak bumi dan bangunan—dengan uang PAD untuk sementara waktu (Handoko, 2013). Pendapatan kotamadya tidak terpengaruh oleh pajak bumi dan bangunan. Pajak properti tidak memengaruhi pendapatan kota. Studi ini mendukung klaim Mahmudi (2010) bahwa bagian pajak daerah dalam PAD meningkat dengan hasil. Tarif lokal rendah jika hasil perbandingannya rendah. Besar. Biaya tanah dan bangunan juga belum terealisasi. Ketidakpatuhan dan kebingungan meningkatkan hutang pajak bumi dan bangunan, membuat tujuan sulit tercapai. Selama peralihan dari pajak federal ke daerah, data akun palsu yang seharusnya dihapus tidak diperbarui (Nurafifah & Irawan, 2020). Rata-rata pendapatan tambahan yang dihasilkan daerah dari tahun 2016 hingga 2020 adalah 26,38%, karena pajak bumi dan bangunan Bandung yang rendah. Dewan Kota Bandung memberikan fasilitas kepada warga untuk membayar pajak bumi dan bangunan untuk meningkatkan persetujuan dan pengetahuan publik tentang kewajiban perpajakannya (Arif Budiarto, 2020). Relaksasi mencegah hukuman keras. Layanan pembayaran QRIS adalah salah satu langkah kebijakan untuk memaksimalkan uang. Hal ini dapat membantu masyarakat membayar iuran tanah dan bangunan untuk mewujudkan cita-cita (Rahmat Kurniawan, 2022). Dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Damaiyanti & Setiawan, 2014) dan (Hernawati, 2013) yang menyatakan bahwa yang membuktikan bahwa kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah rata-rata dibawah 50%.

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil uji F menunjukkan bahwa pajak bumi dan bangunan dan faktor input berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung tahun 2016–2020. Uji F menunjukkan $5,493 > 3,16$, dan model regresi gabungan menghasilkan 0,007, yang lebih kecil dari 0,05. 5,493 mengalahkan Ftabel (3,16). Ekonomi dan input pajak bumi dan bangunan berdampak pada pajak penghasilan Kota Bandung 2016–2020. Biaya tanah dan bangunan dapat meningkatkan pendapatan lokal jika efektif. Biaya tanah dan bangunan meningkatkan basis pajak daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian (Damaiyanti & Setiawan, 2014) dan (Fidiyaningtyas, 2020) yang mengklaim bahwa ada pengaruh positif efektifitas pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Putra et al., 2017) dan (Wibisono & Mulyani, 2019) memverifikasi bahwa pajak bumi dan bangunan memiliki dampak yang menguntungkan terhadap pendapatan asli daerah. Kajian saat ini menunjukkan bahwa retribusi tanah dan bangunan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Bandung tahun 2016–2020. Sehingga bisa diartikan bahwa temuan penelitian ini membuktikan bahwa variabel efektifitas dan kontribusi pajak bumi dan bangunan berdampak secara serentak terhadap variable pendapatan asli daerah di Kota Bandung tahun 2016-2020.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan temuan maka dapat disimpulkan bahwa pajak bumi dan bangunan berdampak pada penjualan Bandung 2016–2020. Meskipun berkisar dari tahun ke tahun, rata-rata pajak bumi dan bangunan Kota Bandung tahun 2016–2020 sebesar 92,59% termasuk dalam kriteria yang dapat digunakan, menunjukkan kemampuan kota yang tinggi untuk menghasilkan pendapatan pajak bumi dan bangunan sambil meningkatkan pendapatan asli daerah. Tarif pembayaran pajak bumi dan bangunan tidak mempengaruhi pendapatan daerah Bandung antara tahun 2016 dan 2020. Pajak bumi dan bangunan Bandung rata-rata 26,38% dari tahun 2016 hingga 2020, norma sedang. Biaya tanah dan bangunan untuk dana daerah Bandung hanya mendongkrak uang daerah. Penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak sepenuhnya mengidentifikasi pendapatan awal suatu daerah karena uang lain dapat mempengaruhinya. Antara Januari 2016 dan Desember 2020, pajak bumi dan bangunan secara signifikan mempengaruhi pendapatan asli daerah Bandung. Biaya tanah dan bangunan serta input mendongkrak kekayaan daerah Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

- Aghniya, U., & Apriliawati, Y. (2022). Pengaruh kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(2), 106–114.
- Andrianto, M. R., & Fadjar, A. (2017). *Pengaruh pengungkapan corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak*.
- Arif Budianto. (2020). *Pendapatan turun drastis, perolehan pajak Kota Bandung baru tercapai Rp1,45 T*. Sindonews.Com. <https://daerah.sindonews.com/read/253098/701/pendapatan-turun-drastis-perolehan-pajak-kota-bandung-baru-tercapai-rp145-t-1606864348>
- Bani Hakiki. (2021). *Sejak 2020, Pendapatan Kota Bandung terus merosot*. BandungBergerak.Id. <https://bandungbergerak.id/Article/Detail/1046/Sejak-2020-Pendapatan-Kota-Bandung-Terus-Merosot>
- Damaiyanti, N. P. D., & Setiawan, I. P. E. (2014). Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan PBB terhadap PAD Kota Denpasar tahun 2009-2013. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(1), 97–105.
- Dinda, T. R. (2021). *Pengaruh penerimaan dan tingkat efektifitas pajak bumi dan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Periode 2015-2019 (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung)*. Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi-Bisnis Universitas Widyatama.
- Fauziah, S. (2021). *Analisis efektivitas dan kontribusi pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Hamparan Perak*. UMSU.
- Fidiyaningtyas, F. (2020). Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2015-2019. *Isoquant: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, Vol. 5 No. 1, 81–91.
- Fujianti, D., & Sachintania, A. (2021). Analisis efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Bandung. *Jurnal E-Bis*, 5(2), 561–572.
- Hernawati, M. (2013). *Analisis pengaruh efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah Kota Bandung (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung)*. Universitas Widyatama.
- Johan, A., Khairusy, M. A., Nugraha, N., & Sriwardini, S. (2022). Preventing fraud through internal audit and whistleblowing system. *Jasa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 6(2), 171–177.
- Mardiasmo. (2017). *Perpajakan edisi terbaru*. Penerbit Andi.

- Muhamad, S. U. (2020). *Studi potensi penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (Di Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat)*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Nurafifah, T., & Irawan, A. (2020). Pengaruh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 190–199.
- Nuryaman, & Christina, V. (2015). *Metodologi penelitian akuntansi dan bisnis*. Ghalia Indonesia.
- Prathiwi, I. A. M. A., Herawati, N. T., AK, S. E., Sulindawati, N. L. G. E., & SE Ak, M. (2015). Analisis strategi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta efektivitas penerimaannya di pemerintah Kota Denpasar tahun 2013-2014. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 3(1).
- Putra, K. Y. A., Yumia, K. S. W., Prayoni, D. A., & Rahayu, K. N. S. (2017). Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Pbb P2) dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)(Studi Kasus Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 7(2).
- Rahmat Kurniawan. (2022). *Pandemi melandai, PAD Kota Bandung mulai membaik*. RMOLJabar. <https://www.rmoljabar.id/Pandemi-Melandai-Pad-Kota-Bandung-Mulai-Membaik>
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.
- Sari, D. (2013). *Konsep dasar perpajakan*. PT. Refika Aditama.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, Kualitatis dan R&D*. PT.Alfabet. Bandung.
- Wibisono, T., & Mulyani, Y. S. (2019). Efektivitas pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Ecodomica*, 3(2).
- Worumi, H. (2018). Model strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarmi Provinsi Papua. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 6(3), 23–39.